

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan merupakan syarat utama bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendapatan tambahan diperlukan setiap tahun. Bagi mereka yang tergolong miskin, banyak penduduk berpenghasilan kurang dari yang dibutuhkan untuk hidup. Diharapkan dengan tumbuhnya perekonomian, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan. Dalam perekonomian, kemiskinan merupakan penyakit yang harus segera diobati dan disembuhkan. Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi negara-negara.

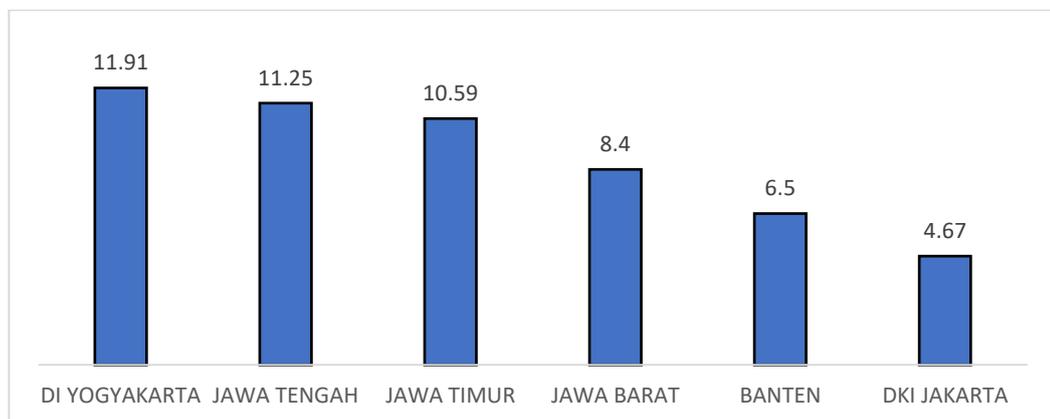
Tingkat kemiskinan yang rendah merupakan indikator keberhasilan upaya pembangunan. Perang melawan kemiskinan kini sedang dilancarkan di Indonesia. Meskipun Indonesia terkenal karena keberhasilannya dalam mengurangi kemiskinan, garis kemiskinan nasionalnya termasuk yang terendah di dunia (Yusuf & Sumner, 2015). Di Indonesia, pemerintah sangat memperhatikan bagaimana rakyatnya mencapai keadilan dan kemakmuran, rencana pembangunan selalu mengikutsertakan pengentasan kemiskinan (2022).

Di Indonesia, kemiskinan adalah ukuran seberapa kaya suatu penduduk. Penduduk akan lebih sejahtera jika kemiskinan diminimalisir. Todaro, et al (2015) berpendapat bahwa kemiskinan yang meluas dan angka yang tinggi merupakan

inti dari semua masalah pembangunan. Dampak negatif dari kemiskinan adalah banyak anak berhenti bersekolah sebab lebih menentukan bekerja membantu orang tuanya. Untuk mencari nafkah dengan upah yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan kualitas sumber daya manusia, mereka mengorbankan usia di mana mereka seharusnya memulai pendidikan mereka serta mengembangkan pengetahuan, bakat dan wawasan mereka. Banyak orang miskin juga berjuang untuk membayar perawatan kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kesulitan pekerjaan dan urbanisasi yang cepat. Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan akan makanan, pakaian dan tempat tinggal disebabkan oleh kemiskinan. Akibatnya mereka menjadi putus asa, melakukan apa saja untuk bertahan hidup.

Ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar diartikan sebagai kemiskinan dalam segala arti kata (Giovanni, 2018). Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan output nasional, yang berarti lebih banyak orang yang bekerja. Oleh karena itu, pengangguran dan kemiskinan harus berkurang (Siregar & Wahyuniarti, 2008). Laju pertumbuhan penduduk dan laju kelahiran yang tinggi yang tidak diimbangi dengan kemajuan faktor pembangunan lainnya tidak meningkatkan pendapatan atau menurunkan tingkat upah sehingga memperparah kemiskinan (Widarukmi & Lintang, 2015). Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Normanda dan Dian, 2013).

Kemiskinan di Indonesia terletak pada provinsi Pulau Jawa (Fadlillah et al., 2016). Salah satunya adalah provinsi Jawa Barat, ini termasuk daerah yang masih berjuang dengan ketimpangan tingkat ekonomi dan kemiskinan.



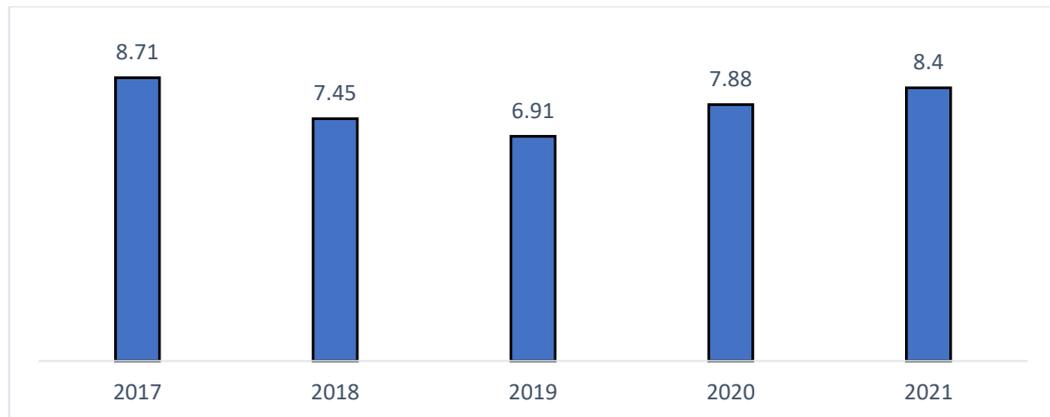
*Sumber: Badan Pusat Statistik di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2021 (Persen)*

**Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Penduduk di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2021**

Badan Pusat Statistik (2022) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sekitar 26,5 juta jiwa atau 9,71% dari penduduk miskin nasional. Angka tersebut turun dibandingkan September 2020, ketika jumlah penduduk miskin di Indonesia tetap sebesar 27,5 juta jiwa dan angka kemiskinan nasional sebesar 10,19%. Pada September 2021, sebagian besar penduduk miskin Indonesia berada di Pulau Jawa dengan total 14,02 juta jiwa. Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa adalah di Yogyakarta sebesar 11,91%. Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan angka kemiskinan 11,25%. Diikuti oleh Jawa Timur sebesar 10,59%, Jawa Barat sebesar 8,4%, Banten sebesar 6,5% dan DKI Jakarta sebesar 4,67%.

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat di lihat bahwa penduduk miskin di provinsi Jawa Barat tahun 2021 menempati peringkat keempat di antara provinsi

di Pulau Jawa. Artinya di provinsi Jawa Barat, tingkat kemiskinan cukup tinggi, begitu masih banyak masalah kemiskinan dan lemahnya kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah. Dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk provinsi dengan penduduk miskin yang tinggi di Jawa barat.

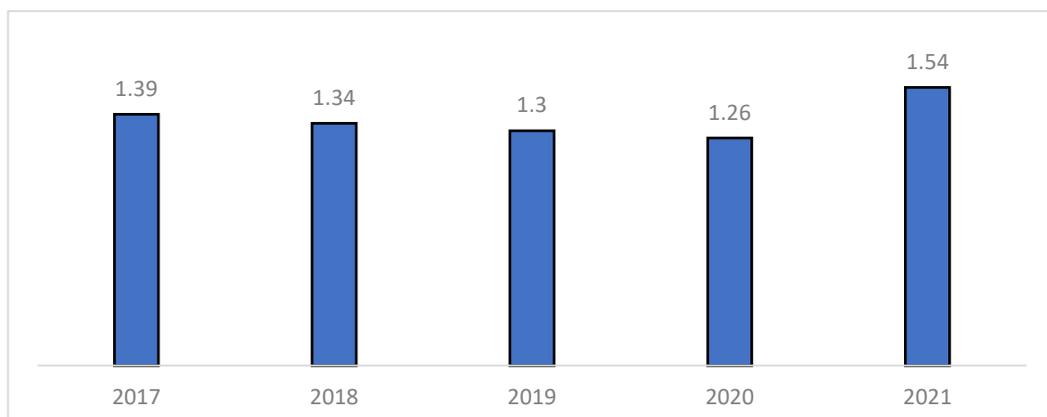


*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Persen)*

### **Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021**

Dari gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Barat berfluktuatif dari tahun 2017 ke tahun 2021 dan proporsi penduduk miskin pada tahun 2017 tertinggi sebesar 8,71%. Namun, pada tahun 2021 angka ini kembali meningkat menjadi 8,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini juga sangat mungkin karena pengangguran yang tinggi meningkatkan jumlah penduduk miskin. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Kemiskinan terjadi karena kemampuan individu atau kelompok pelaku ekonomi berbeda-beda sehingga sebagian tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan adalah mengatasi berbagai masalah pembangunan dan sosial dalam masyarakat, seperti pengangguran dan kemiskinan, melalui pembangunan ekonomi dan untuk mencapai kemakmuran bagi rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat berarti produksi barang/jasa yang dihasilkan semakin meningkat. Dengan demikian, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang/jasa tersebut, sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi kemiskinan yang ada di provinsi Jawa Barat yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran (Oktaviana et al., 2021).



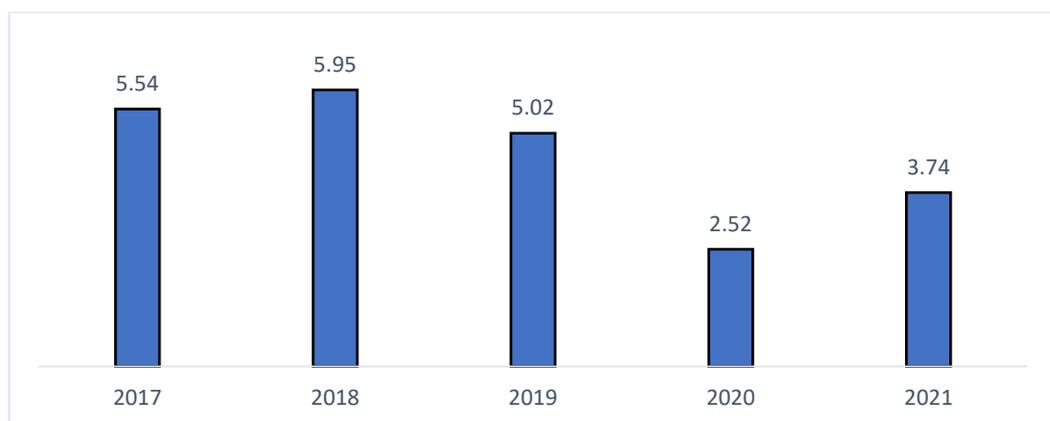
*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Persen)*

**Gambar 1.3 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021**

Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di provinsi Jawa Barat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir paling tinggi mencapai 1,54% pada tahun 2021, menandakan bahwa pertumbuhan tersebut akan berdampak pada kemiskinan apabila penduduk tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memproduksi dan menyerap hasil

produksinya. Beberapa ekonom melihat pertumbuhan penduduk yang tinggi sebagai hambatan pembangunan. Mulyadi mengatakan, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang seperti Indonesia dapat menghambat kemajuan pembangunan.

Mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu metrik yang sering digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu penyebab kemiskinan (Oktaviana et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari waktu ke waktu tidak dapat membawa posisi suatu wilayah untuk stabil. Menurut teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan daerah yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan itu sendiri adalah peningkatan output perkapita jangka panjang yang menyertai aspek dinamis ekonomi.



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Persen)*

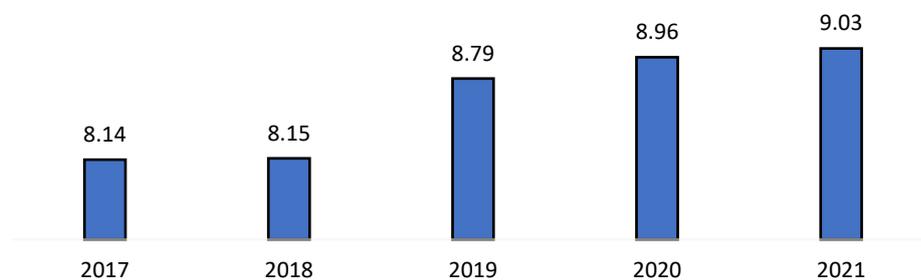
**Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021**

Gambar 1.4 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi turun dari 5,20% menjadi 2,52% pada tahun 2020, karena peningkatan pengangguran akibat pandemi Covid-19. Akibat pandemi Covid-19, warga tidak

dapat melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga aktivitas ekonomi sangat terbatas, yang berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi juga.

Pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa depan generasi muda (Kemendikbud, 2021). Seseorang harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi untuk mendapatkan pekerjaan. Ketika seseorang bekerja dan memperoleh penghasilan yang banyak, maka pendidikan tinggi harus dimiliki oleh orang tersebut agar lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (wahyu Azizah, 2018). Tingkat pendidikan yang relatif rendah dan sebagian besar penduduk hanya memilih pendidikan SD. Tingkat pendidikan yang rendah mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu daerah.

Tingginya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan tingkat pendidikan di Indonesia rendah bahkan biaya pendidikan di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan Prancis (Hakim, 2019). Keadaan ini menunjukkan bahwa, sejauh ini, inisiatif dan program pendidikan yang direncanakan pemerintah daerah belum berdampak signifikan pada keberhasilan mengurangi kemiskinan. Penciptaan keutuhan atau kesempurnaan pribadi adalah tujuan pendidikan.



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Persen)*

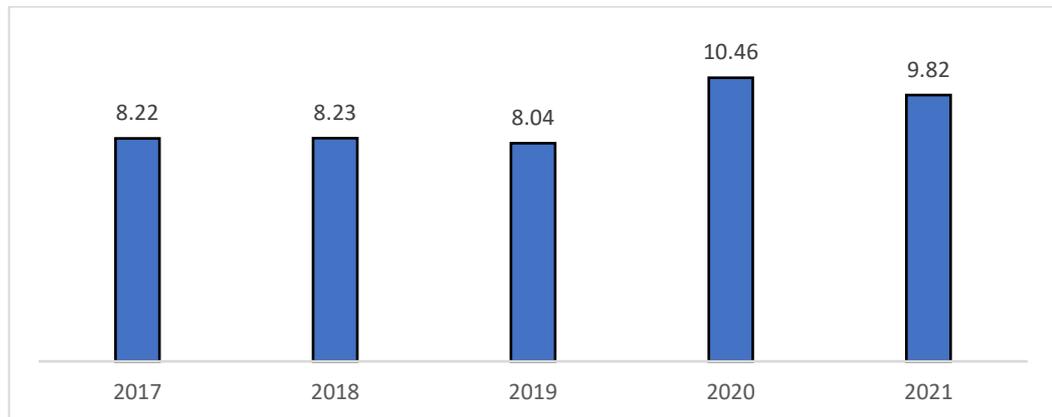
**Gambar 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021**

Gambar 1.5 di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah di Jawa Barat sebesar 8,14% pada tahun 2017 dan akan terus meningkat hingga tahun 2021 mencapai 9,03%. Dari tahun 2017-2021 rata-rata lama sekolah Indonesia cenderung meningkat dimana peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2018 ke 2019, peningkatan yang terjadi adalah sekitar 0,64 tahun atau bisa dikatakan hamper 1 tahun.

Indikator untuk mengukur rata-rata lama sekolah penelitian adalah dengan angka partisipasi murni. Rasio partisipasi murni digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan yang sesuai usia. Angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang menggunakan fasilitas pendidikan sesuai pada tingkat pendidikannya. Jika angka partisipasi murni= 100, berarti semua anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu.

Tidak adanya pekerjaan adalah faktor lain dalam kemiskinan. Meningkatnya pengangguran adalah masalah serius, terutama di negara-negara berkembang. Karena tidak ada pendapatan untuk menutupi pengeluaran pokok selama periode pengangguran yang berkelanjutan, maka akan terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat. Sebab, ada rasio ketergantungan yang tinggi antara karyawan dan pengangguran.

Indikator utama yang sering digunakan pemerintah untuk mengukur efektivitasnya di sektor ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), khususnya tingkat pengangguran (TPT), yang dihitung sebagai proporsi total pengangguran terhadap total angkatan kerja.



*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021 (Persen)*

### **Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021**

Gambar 1.6 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat berfluktuatif dari tahun ke tahun. Tingkat pengangguran di Jawa Barat sebesar 8,22% pada tahun 2017 dan terus meningkat menjadi 9,82% pada tahun 2021. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya jumlah angkatan kerja, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja tetap sama atau bahkan berkurang, sehingga terjadi ketimpangan angkatan kerja yang tidak dapat terserap.

Tingkat pengangguran Kembali meningkat di tahun 2020 kemungkinan karena pandemi Covid-19 yang melanda dunia, melumpuhkan banyak industri termasuk perekonomian dan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan uraian penulis di atas maka judul peneliti penulis adalah **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Barat Tahun 2000 – 2021”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat tahun 2000-2021.
- 2) Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat Pendidikan dan tingkat pengangguran secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat tahun 2000-2021.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat Pendidikan dan tingkat pengangguran secara parsial terhadap tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat tahun 2000-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat Pendidikan dan tingkat kemiskinan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan provinsi Jawa Barat tahun 2000-2021.

## **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak sebagai kegunaan ilmu pengembangan ilmu dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini digunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan sebagai kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang telah dibahas dalam perkuliahan dengan situasi dunia nyata. Bagi akademisi, dimaksudkan agar penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baik secara teoritis maupun eksperimental.
- 2) Diharapkan pemerintah mempertimbangkan penelitian ini ketika merumuskan strategi atau kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pencapaian pendidikan, dan tingkat pengangguran hingga tingkat kemiskinan.
- 3) Bagi masyarakat, komunitas penelitian ini harus dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, termasuk pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi dan sejauh mana pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan, serta untuk mengumpulkan informasi untuk mendukung proposal penelitian, penelitian ini dilakukan melalui website provinsi BPS Jawa Barat.

### **1.5.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2022 yang diawali dengan pengajuan judul kepada pihak Program Studi Ekonomi Pembangunan.

